

Pendampingan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam Upaya Menciptakan Laporan Keuangan Berkualitas di Kabupaten Pinrang

Darmawati*, Andi Kusumawati, Syamsuddin, Aini Indrijawati, Indira Syakira Kirana Juanda

Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
*Corresponding Author: darma.ak@unhas.ac.id

Info Artikel Diterima: 12/10/2024 Direvisi: 15/11/2024 Disetujui: 20/11/2024

Abstract. *The demand for the application of Good Governance (GG) principles in regional financial management emphasizes the importance of transparency and accountability, especially in the management of Regional Property (BMD). The Pinrang District Government faces challenges in preparing BMD reports, such as late reporting, incomplete asset data, and suboptimal recording. This program aims to improve the capability of BMD managers in Pinrang Regency through intensive training and mentoring, in accordance with Permendagri No.47 of 2021. The program implementation methods include lectures, hands-on practice, technical assistance, and evaluation. The materials presented covered BMD bookkeeping, inventory, and reporting, with a focus on using the Simda BMD application to improve report efficiency and accuracy. The evaluation results showed that the program succeeded in improving participants' understanding and skills in BMD management. The resulting outputs include more integrated and quality semesterly BMD reports, as well as an increase in the suitability of asset data with physical conditions in the field. With this success, the program made a real contribution in supporting more transparent, accountable, and regulated regional asset governance, as well as strengthening the capacity of the Pinrang Regency Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) in overseeing better regional financial management.*

Keywords: *Accountability, Assets management, Good governance, Financial reports, Transparency.*

Abstrak. Tuntutan akan penerapan prinsip Good Governance (GG) dalam pengelolaan keuangan daerah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Kabupaten Pinrang menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan BMD, seperti pelaporan yang terlambat, data aset yang tidak lengkap, dan pencatatan yang belum optimal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pengelola BMD di Kabupaten Pinrang melalui pelatihan dan pendampingan intensif, sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021. Metode pelaksanaan program meliputi ceramah, praktik langsung, pendampingan teknis, dan evaluasi. Materi yang disampaikan mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD, dengan fokus pada penggunaan aplikasi Simda BMD untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi laporan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam pengelolaan BMD. Luaran yang dihasilkan meliputi laporan BMD semesteran yang lebih terintegrasi dan berkualitas, serta peningkatan kesesuaian data aset dengan kondisi fisik di lapangan. Dengan keberhasilan ini, program memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola aset daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, sekaligus memperkuat kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Barang milik daerah, *Good governance*, Laporan keuangan, Transparansi.

How to Cite: Darmawati, D., Kusumawati, A., Syamsuddin, S., Indrijawati, A., Juanda, I. S. K. (2024). Pendampingan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam Upaya Menciptakan Laporan Keuangan Berkualitas di Kabupaten Pinrang. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 858-867. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i4.5006>



Copyright (c) 2024 Darmawati, Andi Kusumawati, Syamsuddin, Aini Indrijawati, Indira Syakira Kirana Juanda. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Tuntutan untuk menerapkan prinsip Good Governance (GG), khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, menjadi keharusan di lingkungan instansi pemerintahan. Pemerintah Daerah (Pemda), sebagai entitas yang menjalankan otonomi daerah, turut bertanggung jawab dalam memastikan tata kelola yang baik, termasuk dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dengan regulasi yang terus berkembang, Pemda perlu memperbarui pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintahannya guna mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi tersebut. Proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) di BKAD Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, namun terkendala oleh keterbatasan aplikasi SIMDA BMD dan keterlambatan

laporan dari OPD (Wokas, Veronica L. Sondakh & Latjandu, 2023, p. 1126). Pengelolaan Barang Milik Daerah di BPKPD Kabupaten Malaka telah berjalan baik sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016, namun masih terdapat kendala berupa keterlambatan laporan dari OPD, terbatasnya pemanfaatan barang, dan kurangnya pengamanan hukum (Virgilius Gracelio Seran et al., 2024, p. 116). Perlindungan kekayaan intelektual yang optimal mendorong penciptaan pengetahuan, inovasi substantif, dan optimalisasi struktur inovasi teknologi regional, sementara perlindungan yang terlalu kuat atau lemah menghambat proses ini, menekankan perlunya reformasi sistem perlindungan untuk mendukung pembangunan berbasis inovasi (Luo & Zhao, 2024, p. 1). Perencanaan regional di Afrika dapat berhasil dengan memanfaatkan big data, kecerdasan buatan, dan tenaga kerja terampil untuk mengatasi keterbatasan data masa lalu yang menghambat pengembangan ilmu dan kebijakan regional (Chirisa et al., 2024, p. 1). Studi ini menemukan bahwa kebijakan Demonstration Base for Entrepreneurship and Innovation (DBE) di Cina secara signifikan mendorong pengembangan terkoordinasi regional, dengan dampak yang lebih besar di kota-kota perifer dan wilayah tengah serta timur dibandingkan wilayah barat (Bao et al., 2024, p. 1). Studi ini menunjukkan bagaimana integrasi data transportasi dan migrasi dapat mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan aset daerah, seperti properti publik, dalam kerangka tata kelola yang lebih baik (Wu et al., 2024, p. 1).

Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PPBMN/D), yang menggantikan PP Nomor 6 Tahun 2006, serta diperkuat dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola aset secara lebih efektif. Hal ini mencakup pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan yang terintegrasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pengelolaan BMD di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pinrang, masih menghadapi tantangan, seperti pelaporan yang terlambat, data yang belum lengkap, dan aset yang belum tercatat dalam neraca keuangan. Inventarisasi Barang Milik Negara di Biro Kepegawaian dan Organisasi belum efektif sesuai peraturan Kementerian LHK, terlihat dari KIB yang belum lengkap, DBR yang belum diperbarui, dan perbedaan kondisi barang antara laporan dan fakta lapangan (Widyatama & Suhartono, 2020, p. 13). Prototipe Sistem Informasi SIBAMIRA dirancang untuk mendukung digitalisasi inventarisasi Barang Milik Negara di Universitas Jambi sesuai aturan yang berlaku (Ariyani et al., 2023, p. 61). Pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan aset tanah milik daerah Kota Dumai mencakup pengamanan hukum, fisik, dan inventarisasi, serta pemeliharaan dan evaluasi, namun terkendala oleh data alamat yang kurang lengkap, tanah tanpa sertifikat, dan kurangnya papan plang (Fadillah Adelia, 2024, p. 559). Peningkatan kinerja pegawai dalam penatausahaan barang milik daerah membutuhkan sinergi, komunikasi yang baik, bimbingan teknis, serta dukungan lingkungan kerja dan kerjasama antarpegawai untuk mengatasi kendala pencatatan aset (Artana et al., 2024, p. 69). Akuntansi biaya akhir periode dalam sistem inventaris serial menghasilkan inefisiensi biaya signifikan, terutama dalam sistem tahap tunggal, dan mengusulkan model akuntansi biaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan efisiensi penyimpanan dan kekurangan inventaris (Wang & Wan, 2020, p. 1).

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian ini dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pendampingan intensif kepada para pengelola BMD di Kabupaten Pinrang. Fokus kegiatan ini adalah memberikan pelatihan terkait pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD, yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No.47 Tahun 2021. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam menggunakan aplikasi Simda BMD, yang menjadi alat utama dalam mendukung proses digitalisasi tata kelola aset daerah. Pengelolaan aset daerah Kabupaten Melawi, yang mencakup perencanaan strategis, pelaksanaan sesuai peraturan, penataan data, dan pengawasan fungsional, diharapkan semakin akuntabel, sistematis, dan tepat waktu dengan data yang lengkap dan terorganisir (Yadisar, 2023, pp. 99–106).. Kerangka multidimensi tata kelola regional yang dikaji dalam pengabdian ini menyoroti pentingnya faktor tata kelola dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, yang relevan dengan upaya PKM untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah sebagai bagian dari tata kelola yang efektif (Li et al., 2025, p. 1).

Lingkungan Pemerintahan yang baik dan keuangan digital dapat mendorong inovasi regional, dengan moderasi keuangan digital yang relevan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, sejalan dengan tujuan utama tata kelola aset berbasis teknologi (Zhang et al., 2024, p. 1). Reformasi keuangan regional di Tiongkok berhasil menekan finansialisasi perusahaan nonkeuangan dan mendorong investasi riil, termasuk inovasi, melalui pemerataan laba dan alokasi kredit yang seimbang, yang relevan dengan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung transparansi tata kelola (Song et al., 2024, p. 1). Efisiensi belanja pemerintah terbukti meningkatkan kapasitas inovasi regional, terutama di wilayah dengan preferensi investasi tinggi dan perkembangan keuangan rendah, menyoroti relevansinya dalam mendukung pengelolaan aset daerah untuk mendorong pembangunan berkualitas tinggi (Zhao & He, 2024, p. 693). Digitalisasi regional meningkatkan kinerja ESG perusahaan melalui pengungkapan informasi lingkungan, donasi sosial, dan ketahanan risiko, menunjukkan relevansinya dalam mendorong pengelolaan aset daerah yang transparan dan berkelanjutan di era digital (Li & Zhu, 2024, p. 1).

Luaran yang diharapkan dari program ini meliputi peningkatan kapabilitas pengelola barang di Kabupaten Pinrang dalam menyusun laporan BMD yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, program ini diharapkan dapat menghasilkan laporan BMD semesteran yang sesuai dengan standar, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan aset yang lebih terintegrasi dan transparan. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik, serta mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemda Kabupaten Pinrang.

Metode Pelaksanaan

Program ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan aplikatif, melibatkan para pengelola Barang Milik Daerah (BMD) di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pinrang. Metode pelaksanaannya dirancang dalam beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan pelatihan, pendampingan teknis, dan evaluasi akhir, untuk memastikan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi antara tim pelaksana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang, dan pihak terkait untuk menentukan jadwal, lokasi, serta peserta kegiatan. Selain itu, tim menyusun modul pelatihan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021. Aplikasi Simda BMD dipilih sebagai alat utama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini, sehingga perangkat lunak dan data awal dari SKPD juga dipersiapkan sebelumnya untuk keperluan simulasi.

Tahap pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam bentuk ceramah dan praktik langsung, yang berlangsung selama beberapa sesi. Materi disampaikan dalam tiga bagian utama: (1) pembukuan, yang mencakup pencatatan aset ke dalam sistem, (2) inventarisasi, yang berfokus pada identifikasi, pengkodean, dan pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB), dan (3) pelaporan, yang membahas penyusunan laporan semesteran hingga tahunan BMD. Setiap sesi pelatihan melibatkan praktik simulasi menggunakan aplikasi Simda BMD untuk memastikan peserta memahami langkah-langkah pengelolaan aset secara digital.

Selanjutnya, pada tahap pendampingan teknis, tim pelaksana memberikan bimbingan secara langsung kepada masing-masing SKPD. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu peserta mengatasi kendala spesifik yang dihadapi dalam pengelolaan aset di instansi mereka, seperti masalah sinkronisasi data atau kesalahan dalam pencatatan. Dalam tahap ini, peserta juga diajak untuk melakukan rekonsiliasi data antara laporan BMD yang dihasilkan dengan kondisi fisik aset di lapangan.

Tahap akhir adalah evaluasi dan umpan balik, di mana hasil kerja peserta selama pelatihan dan pendampingan dianalisis oleh tim. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kelengkapan laporan BMD, kesesuaian data dengan format standar, serta kemampuan peserta dalam mengoperasikan aplikasi Simda BMD. Selain itu, tim juga memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan aset di Kabupaten Pinrang.

Metode ini dirancang untuk memberikan pembelajaran yang komprehensif dan relevan, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengelolaan BMD yang akurat dan akuntabel sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kegiatan pelatihan

Pada sesi pertama, peserta diberikan pemahaman tentang konsep dasar pembukuan sebagai bagian dari tata kelola BMD (Gambar 1). Pembukuan merupakan proses pencatatan data keuangan dan aset daerah secara sistematis. Materi ini mencakup ruang lingkup dan mekanisme pembukuan BMD yang diatur dalam Permendagri No.47 Tahun 2021. Penyampaian materi dilakukan dalam dua sesi yang memaparkan prosedur pencatatan, penyesuaian transaksi, dan penyajian data ke dalam format yang relevan. Pemahaman yang kuat mengenai pembukuan ini menjadi fondasi untuk tahapan inventarisasi dan pelaporan yang lebih lanjut.



Gambar 1. *Pelatihan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah*

Materi kedua dalam pelatihan adalah inventarisasi BMD. Inventarisasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah tercatat dengan baik dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada sesi ini, peserta diajarkan langkah-langkah identifikasi aset, pencatatan kondisi fisik, serta pengkodean yang mempermudah pengelolaan. Dua sesi khusus ini juga mencakup penjelasan tentang pentingnya memperbarui data inventaris secara berkala guna mendukung akurasi pelaporan. Peserta diberikan simulasi langsung terkait pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk melatih keterampilan teknis mereka.

Sesi terakhir berfokus pada penyusunan laporan dan rekonsiliasi BMD. Pelaporan merupakan elemen penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan aset daerah kepada publik. Materi ini mencakup isi laporan, batas waktu penyusunan dan penyampaian, serta prosedur rekonsiliasi yang efektif. Dalam tiga sesi pelatihan, peserta diberikan panduan rinci tentang format pelaporan sesuai Permendagri No.47 Tahun 2021. Rekonsiliasi antara data inventarisasi dan pembukuan juga dijelaskan untuk memastikan tidak adanya selisih data.

Sebagai penutup, peserta mengikuti satu sesi latihan kasus untuk mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Latihan ini mencakup simulasi pengkodean aset, pengisian KIB, dan penyusunan laporan sesuai dengan format resmi. Dengan latihan ini, peserta dapat mengidentifikasi kelemahan pemahaman mereka dan memperbaikinya di bawah bimbingan tim PPM.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD secara optimal, sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai regulasi. Program ini merupakan langkah nyata dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di Kabupaten Pinrang.

2. Kegiatan penyusunan laporan BMD

Pelaksanaan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pinrang dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Simda BMD (Gambar 2). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan BMD secara digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi data. Penggunaan aplikasi Simda BMD juga memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Permendagri No.47 Tahun 2021, serta dapat diakses secara terintegrasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil utama dari penerapan aplikasi Simda BMD adalah Rekapitulasi Barang ke Neraca, yang berfungsi sebagai gambaran umum atas aset yang dimiliki oleh setiap SKPD. Rekapitulasi ini mencakup informasi tentang nilai total aset tetap, aset lancar, dan kategori lainnya yang relevan dengan neraca keuangan daerah. Proses rekapitulasi dilakukan secara otomatis oleh aplikasi berdasarkan data yang diinput oleh masing-masing SKPD, sehingga meminimalkan potensi kesalahan manual. Dengan adanya rekapitulasi yang terstruktur, pemerintah daerah dapat memperoleh data agregat yang lebih akurat dan efisien untuk kebutuhan pelaporan keuangan.



Gambar 2. Pendampingan penyusunan laporan BMD

Selain itu, aplikasi Simda BMD juga menghasilkan Rincian Barang ke Neraca, yang menyajikan data secara lebih mendalam tentang masing-masing item aset yang tercatat. Rincian ini mencakup deskripsi aset, lokasi, kondisi fisik, serta nilai perolehan dan penyusutannya. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. Rincian barang ini juga menjadi referensi utama dalam proses audit, baik oleh inspektorat daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna memastikan kesesuaian antara data fisik dan catatan administrasi.

Dengan dukungan aplikasi Simda BMD, proses penyusunan laporan BMD menjadi lebih terstandar dan terintegrasi, memungkinkan setiap SKPD untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Integrasi ini juga mendorong peningkatan tata kelola aset daerah secara keseluruhan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan terpercaya.

3. Kegiatan diseminasi laporan BMD

Kegiatan diseminasi laporan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menyampaikan hasil pengelolaan aset daerah kepada para pemangku kepentingan (Gambar 3). Diseminasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai media evaluasi terhadap pengelolaan aset yang telah dilakukan oleh SKPD. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, diseminasi laporan

BMD menjadi bagian penting dari upaya menciptakan pengelolaan aset yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan diseminasi dilakukan secara terstruktur, melibatkan berbagai pihak, seperti SKPD, inspektorat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi laporan hasil rekapitulasi dan rincian aset, analisis tren pengelolaan BMD, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan masukan terkait kendala teknis yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelaporan aset.



Gambar 3. *Diseminasi penyusunan laporan BMD*

Kegiatan diseminasi biasanya dilakukan dalam bentuk forum koordinasi, seminar, atau lokakarya yang difasilitasi oleh BPKAD. Dalam forum ini, laporan BMD yang telah dihasilkan dari aplikasi seperti Simda BMD dipaparkan secara komprehensif. Fokus utama adalah mempresentasikan kondisi terkini BMD, seperti jumlah, nilai, serta penyusutan aset, disertai dengan pemetaan aset yang memerlukan tindak lanjut, seperti penghapusan, perbaikan, atau optimalisasi penggunaan.

Selain itu, diseminasi laporan BMD juga menjadi momen penting untuk mengukur kepatuhan SKPD terhadap regulasi yang berlaku, seperti Permendagri No.47 Tahun 2021. Melalui evaluasi laporan yang diseminasi, SKPD dapat mengetahui tingkat kelengkapan dan akurasi data mereka. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana aksi perbaikan pengelolaan aset di masa depan.

Dengan adanya kegiatan diseminasi laporan BMD, pemerintah daerah dapat membangun komunikasi yang lebih baik antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset daerah, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pengelolaan aset yang transparan dan terintegrasi untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang berkualitas.

Simpulan dan Tindak Lanjut

Program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan para peserta, khususnya pengelola aset dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pinrang, dalam melaksanakan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan standar yang diatur dalam Permendagri No.47 Tahun 2021. Melalui pelatihan yang terstruktur dan pendampingan intensif, peserta mampu menggunakan aplikasi Simda BMD untuk menghasilkan laporan yang akurat dan terintegrasi. BPKPD Kabupaten Pinrang berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan ini, mulai dari koordinasi pelaksanaan hingga penyediaan dukungan teknis bagi peserta selama proses pelatihan berlangsung. Selain itu, latihan kasus yang diberikan berhasil memperkuat kemampuan peserta dalam menerapkan teori ke dalam praktik, termasuk simulasi pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB) dan penyusunan laporan aset. Evaluasi program menunjukkan bahwa kualitas laporan BMD yang dihasilkan oleh SKPD meningkat secara signifikan, baik dari segi akurasi data maupun kesesuaiannya dengan kondisi fisik aset. Dampak ini mencerminkan keberhasilan program dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi, sekaligus memperkuat peran BPKPD Kabupaten Pinrang sebagai penggerak utama dalam pengelolaan aset daerah yang lebih baik.

Tindak lanjut dari program ini mencakup pendampingan berkelanjutan kepada SKPD di Kabupaten Pinrang untuk memastikan implementasi yang konsisten terhadap pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan Permendagri No.47 Tahun 2021. BPKPD Kabupaten Pinrang akan terus menyediakan pelatihan lanjutan terkait pengelolaan BMD, termasuk penguatan penggunaan aplikasi Simda BMD untuk mengakomodasi pembaruan regulasi atau kebutuhan teknis yang muncul. Selain itu, akan dilakukan evaluasi rutin terhadap laporan yang disusun SKPD untuk mengidentifikasi kendala atau ketidaksesuaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Forum diskusi berkala juga selalu diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi antar-SKPD, sehingga tercipta sinergi dalam pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan hasil program sekaligus mendukung perbaikan kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Ariyani, R., Bintana, R. R., Arsa, D., & Abidin, Z. (2023). Pengoptimalan Proses Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Universitas Jambi dengan SIBAMIRA. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo*, 17(1), 61–72. <https://doi.org/10.33998/mediasisfo.2023.17.1.194>
- Artana, I. W., Snanfi, F. L., & Sedyaningsih, S. (2024). Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mappi. *Musamus Journal of Public Administration*, 7(1), 69–81.
- Bao, D., Zhang, J., Huang, Z., Lv, L., & Fu, Q. (2024). Impacts of business environment on regional development: Evidence from a natural experiment. *International Review of Economics & Finance*, 103735. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103735>
- Chirisa, I., Odero, K., & Gambe, T. R. (2024). Regional planning: A failed or

- flawed project for Africa? Taking advantage of big data science on the horizon. *Regional Science Policy & Practice*, 16(12), 100151. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100151>
- Fadillah Adelia, A. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai Fadillah Adelia 1 , Andriyus 2 1. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(4), 559–567.
- Li, Y., Wang, Z., Lin, Z., & Gao, Y. (2025). Revisiting regional governance and regional development: Measurements, linkages and coupling effect. *World Development*, 185, 106816. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106816>
- Li, Y., & Zhu, C. (2024). Regional digitalization and corporate ESG performance. *Journal of Cleaner Production*, 473, 143503. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143503>
- Luo, Q., & Zhao, X. (2024). Intellectual property protection intensity and regional technological innovation structure: Based on the perspective of economic complexity theory. *Heliyon*, 10(21), e39964. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39964>
- Song, S., Wang, F., & Liu, X. (2024). Impact of the regional financial reform on corporate financialization: Evidence from China. *International Review of Financial Analysis*, 96, 103641. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103641>
- Virgilius Gracelio Seran, Petrus E. De Rosari, & Cicilia A. Tungga. (2024). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Di Kabupaten Malaka. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(2), 116–130. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i2.352>
- Wang, Q., & Wan, G. (2020). Cost accounting methods and periodic-review policies for serial inventory systems. *Computers & Operations Research*, 118, 104902. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.104902>
- Widyatama, B., & Suhartono, B. (2020). Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 13–25.
- Wokas, Veronica L. Sondakh, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 1126–1136. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47136>
- Wu, J.-Y., Liao, C.-H., Tsai, C.-C., & Kwok, O.-M. (2024). Using learning analytics with temporal modeling to uncover the interplay of before-class video viewing engagement, motivation, and performance in an active learning context. *Computers & Education*, 212, 104975. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104975>
- Yadisar, A. M. (2023). MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET DAERAH. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 99–106. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.722>
- Zhang, H., Cai, C., Zhang, X., Tu, Y., & Zhu, Q. (2024). Relationship between business environment and regional innovation level: Examining the moderating role of digital finance. *International Review of Financial*

Analysis, 96, 103647.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103647>
Zhao, R., & He, P. (2024). Government spending efficiency, fiscal decentralization and regional innovation capability: Evidence from China. *Economic Analysis and Policy*, 84, 693–706.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2024.08.033>

Ucapan Terima Kasih

Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LP2M Unhas). Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan melalui pendanaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 0118/UN4.1/KEP/2024 tertanggal 29 Januari 2024. Bantuan ini memungkinkan terselenggaranya program dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dukungan ini tidak hanya membantu dalam mewujudkan tujuan program, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas tata kelola aset daerah di Kabupaten Pinrang. Kami berharap program ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang.